ASESMEN PERAN INFORMASI GEOSPASIAL DALAM PROSES BOUNDARY MAKING DAN SENGKETA BATAS DAERAH PADA ERA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA
SUMARYO, Ir. Subaryono, MA., Ph.D; Ir. Djurdjani, MSP., M.Eng., Ph.D.; Prof. Ir. Sobar Sutisna, M.Surv. Sc., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Halaman Persetujuan..... iii
Pernyataan Promovendus..... iv
Prakata..... v
Daftar Isi..... ix
Daftar Gambar..... xiii
Daftar Tabel xvi
Daftar Lampiran..... xix
Daftar Arti Lambang..... xx
Daftar Singkatan..... xxi
Intisari xxii
Abstract xxiv

BAB I. PENDAHULUAN..... 1
I.1. Latar belakang..... 1
I.2. Perumusan masalah..... 9
I.3. Keaslian penelitian..... 12
I.4. Tujuan penelitian 16
I.5. Faedah yang diharapkan 17
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA..... 18
II.1. Boundary making batas wilayah internasional..... 18
II.1.1 Perkembangan teori*boundary making*..... 18
II.1.2. Relevansi teori *boundary making*..... 23
II.2. Informasi geospasial dalam konteks batas wilayah..... 27
II.3. Kasus sengketa batas wilayah 32
BAB III.LANDASAN TEORI..... 44
III.1. Batas wilayah 44
III.2. Teori *boundary making*..... 46
III.2.1.Tahapan *boundary making* 48
III.2.2.Model kerangka kerja *boundary making*..... 52

UNIVERSITAS GADJAH MADA
ASESMEN PERAN INFORMASI GEOSPASIAL DALAM PROSES BOUNDARY MAKING DAN SENGKETA BATAS DAERAH PADA ERA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA
SUMARYO, Ir. Subaryono, MA., Ph.D; Ir. Djurdjani, MSP., M.Eng., Ph.D.; Prof. Ir. Sobar Sutisna, M.Surv. Sc., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

III.2.3. Karakteristik *boundary making* 56
III.3. Geospasial 57
III.3.1. Informasi geospasial 59
III.3.2. Datum geodetik 63
III.3.3. Sistem koordinat 69
III.3.4. Proyeksi peta 74
III.3.5. Skala peta 78
III.3.6. Toponim 80
III.3.7. Kartometrik 83
III.3.8. Kualitas peta 83
III.3.9. Angka signifikan (*significant figure*) untuk estimasi ketelitian data dijital 85
III.3.10. Peran informasi geospasial dalam *boundary making* 89
III.4. Teori konflik 95
III.4.1. Pengertian konflik dan sengketa 95
III.4.2. Diagnosis konflik 95
III.4.3.Sengketa batas wilayah 98
III.4.4. Hubungan sengketa batas wilayah dengan peta 98
III.5. Asesmen 99
BAB IV. METODE PENELITIAN 101
IV.1. Model konseptual penelitian 101
IV.2. Pelaksanaan penelitian 103
IV.2.1. Pengumpulan data 105
IV.2.2. Asesmen kerangka kerja penetapan dan penegasan batas daerah 106
IV.2.3. Pengelompokan UUPD beserta peta lampiran UUPD atas dasar PP No.129 tahun 2000 dan PP No.78 tahun 2007 108
IV.2.4. Asesmen peran informasi geospasial dalam penetapan batas daerah 108
IV.2.5. Diagnosis penyebab sengketa batas daerah 114
IV.2.6. Wawancara 115

UNIVERSITAS GADJAH MADA
ASESMEN PERAN INFORMASI GEOSPASIAL DALAM PROSES BOUNDARY MAKING DAN SENGKETA BATAS DAERAH PADA ERA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA
SUMARYO, Ir. Subaryono, MA., Ph.D; Ir. Djurdjani, MSP., M.Eng., Ph.D.; Prof. Ir. Sobar Sutisna, M.Surv. Sc., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN 117

V.1.Identifikasi kerangka kerja penetapan dan penegasan batas daerah di Indonesia 117

V.1.1. Kerangka kerja penetapan batas daerah merujuk PP No.129 tahun 2000 117

V.1.2. Kerangka kerja penetapan batas daerah merujuk PP No.78 Tahun 2007 120

V..1.3 Kerangka kerja penegasan batas daerah di Indonesia pada era OTDA 125

V.2.Pengelompokan UUPD beserta peta lampiran UUPD 135

V.3.Identifikasi kondisi informasi geospasial dalam penetapan batas daerah 137

V.3.1. Kondisi informasi geospasial pada periode berlakunya PP No.129 tahun 2000 137

V.3.2. Kondisi informasi geospasial pada periode berlakunya PP No.78 tahun 2007 145

V.4. Evaluasi penggunaan informasi geospasial dalam penetapan batas daerah 148

V .4.1. Penggunaan peta dasar dalam penetapan batas daerah pada masa berlakunya PP No.129 tahun 2000 148

V.4.2. Kondisi peta lampiran UUPD pada masa berlakunya PP No.129 tahun 2000 151

V.4.3. Penggunaan peta dasar dalam penetapan batas daerah pada masa berlakunya PP No.78 tahun 2007 158

V.4.4. Kondisi peta lampiran UUPD hasil penetapan batas daerah periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2009..... 161

V.5.Kontribusi informasi geospasial dalam munculnya sengketa batas daerah pada penegasan batas daerah..... 164

V.5.1. Penyebab sengketa batas daerah di Indonesia 164

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
ASESMEN PERAN INFORMASI GEOSPASIAL DALAM PROSES BOUNDARY MAKING DAN SENGKETA BATAS DAERAH PADA ERA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA
SUMARYO, Ir. Subaryono, MA., Ph.D; Ir. Djurdjani, MSP., M.Eng., Ph.D.; Prof. Ir. Sobar Sutisna, M.Surv. Sc., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

V.5.2. Kontribusi informasi geospasial dalam sengketa batas daerah 170
V.6.Penguatan peran informasi geospasial dalam proses penetapan dan penegasan batas daerah di Indonesia 177
V.6.1. Desain model kerangka kerja penetapan dan penegasan batas daerah..... 177
V.6.2.Kebutuhan informasi geospasial untuk penetapan dan penegasan batas daerah 188
VI. KESIMPULAN DAN SARAN..... 197
VI.1.Kesimpulan 197
VI.2. Saran 198
DAFTAR PUSTAKA..... 199
LAMPIRAN..... 212

UNIVERSITAS GADJAH MADA
ASESMEN PERAN INFORMASI GEOSPASIAL DALAM PROSES BOUNDARY MAKING DAN SENGKETA BATAS DAERAH PADA ERA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA
SUMARYO, Ir. Subaryono, MA., Ph.D; Ir. Djurdjani, MSP., M.Eng., Ph.D.; Prof. Ir. Sobar Sutisna, M.Surv. Sc., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Obyek penelitian pada area permasalahan dari hubungan antararanah keilmuan *boundary making*, geospasial dan konflik/sengketa 12
Gambar 2.1. Tahapan boundary *making* Jones (1945) menurut Pratt (2006) 20
Gambar 2.2. Komponen-komponen delimitasi batas wilayah maritim..... 21
Gambar 2.3. Pengembangan model *boundary making* Jones menurut Pratt (2011) 22
Gambar 3.1. Diagram tahapan kegiatan delimitasi dan demarkasi Jones 56
Gambar 3.2. Metode*Turning Points* (Jones, 1945) 50
Gambar 3.3. Tahapan administrasi pada teori Jones..... 52
Gambar 3.4. Model kerangka kerja *boundary making* batas internasional 53
Gambar 3.5. Aspek politik, hukum dan teknis (geospasial) dalam *boundary making*..... 56
Gambar 3.6. Prinsip dasar pemetaan (Schofield, 2002)..... 62
Gambar3.7. Prinsip dasar pemetaan..... 63
Gambar 3.8. Datum geodetik 64
Gambar 3.9. Datum lokal pada penampang potongan meridian 65
Gambar 3.10. Datum geodetik WGS 84..... 67
Gambar 3.11. Kedudukan silinder terhadap bola bumi pada proyeksi UTM..... 71
Gambar 3.12. Sistem penomeran lembar peta RBI..... 73
Gambar 3.13. Posisi titik A (φ, λ) pada sistem geodetik..... 74
Gambar 3.14. Hubungan koordinat geografis P (φ, **λ**) dengan koordinat proyeksi P(x,y) 75
Gambar 3.15. Sistem koordinat grid pada proyeksi peta UTM..... 76
Gambar 3.16. Gratikul (biru) dan grid (hitam) pada sistem koordinat UTM..... 77
Gambar 3.17. Tampilan skala peta secara perbandingan (*ratio*) dan secara grafis..... 79

Gambar 3.18. Grafik hubungan skala peta dengan cakupan area dan kerincian

UNIVERSITAS GADJAH MADA
ASESMEN PERAN INFORMASI GEOSPASIAL DALAM PROSES BOUNDARY MAKING DAN SENGKETA BATAS DAERAH PADA ERA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA
SUMARYO, Ir. Subaryono, MA., Ph.D; Ir. Djurdjani, MSP., M.Eng., Ph.D.; Prof. Ir. Sobar Sutisna, M.Surv. Sc., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Informasi (*feature reduction factor*)..... 80
Gambar 3.19. Peran peta dalam *boundary making* 90
Gambar 3.20. *The Circle of Conflict* menurut Moore, 1986 96
Gambar 4.1. Model konseptual penelitian..... 102
Gambar 4.2. Diagram alir pelaksanaan penelitian 104
Gambar 4.3. Asesmen informasi geospasial pada tahap penetapan batas daerah 109
Gambar 5.1. Kerangka kerja pembentukan daerah menurut PP No.129 tahun 2000 119
Gambar 5.2. Kerangka kerja pembentukan daerah menurut PP No.78 tahun 2007 123
Gambar 5.3. Kerangka kerja penegasan batas daerah menurut Permendagri No.1 tahun 2006 127
Gambar 5.4. Pelaksanaan teknis penegsan batas daerah menurut Permendagri No. 1 tahun 2006 130
Gambar 5.5. Indeks ketersediaan peta RBI skala 1:250.000, skala 1:50.000 dan skala 1:25.000 tahun 2000..... 138
Gambar 5.6. Indeks ketersediaan peta RBI skala 1:250.000, skala 1:50.000 dan skala 1:25.000 tahun 2001..... 138
Gambar 5.7. Indeks ketersediaan peta RBI skala 1:250.000, skala 1:50.000 dan skala 1:25.000 tahun 2002..... 139
Gambar 5.8. Indeks ketersediaan peta RBI skala 1:250.000, skala 1:50.000 dan skala 1:25.000 tahun 2003..... 139
Gambar 5.9. Indeks ketersediaan peta RBI skala 1:250.000, skala 1:50.000 dan skala 1:25.000 tahun 2007..... 142
Gambar 5.10. Indeks ketersediaan peta RBI skala 1:250.000, skala 1:50.000 dan skala 1:25.000 pada tahun 2008 146
Gambar 5.11. Indeks ketersediaan peta RBI skala 1:250.000, skala 1:50.000 dan skala 1:25.000 pada tahun 2009 146

Gambar 5.12. Contoh peta wilayah lampiran UUPD yang dihasilkan pada proses

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
ASESMEN PERAN INFORMASI GEOSPASIAL DALAM PROSES BOUNDARY MAKING DAN SENGKETA BATAS DAERAH PADA ERA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA
SUMARYO, Ir. Subaryono, MA., Ph.D; Ir. Djurdjani, MSP., M.Eng., Ph.D.; Prof. Ir. Sobar Sutisna, M.Surv. Sc., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

pembentukan DOB menggunakan PP No.129 tahun 2000 157

Gambar 5.13. Contoh *specimen* peta wilayah lampiran UUPD produk PP.78 tahun 2007 163

Gambar 5.14. Peta lampiran UUPD No.3 tahun 2003 untuk Kabupaten Seluma 174

Gambar 5.15.Model kerangka kerja penetapan dan penegasan batas daerah dalam rangka pembentukan DOB di Indonesia..... 179

Gambar 5.16. Indeks peta sepanjang garis batas calon Daerah Persiapan 182

Gambar 5.17. Diagram alir penetapan batas daerah calon Daerah Persiapan secara Kartometrik..... 184

Gambar 5.18. Usulan pelaksanaan penegasan batas daerah DP sebagai calon DOB..... 187

UNIVERSITAS GADJAH MADA
ASESMEN PERAN INFORMASI GEOSPASIAL DALAM PROSES BOUNDARY MAKING DAN SENGKETA BATAS DAERAH PADA ERA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA
SUMARYO, Ir. Subaryono, MA., Ph.D; Ir. Djurdjani, MSP., M.Eng., Ph.D.; Prof. Ir. Sobar Sutisna, M.Surv. Sc., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penelitian batas daerah dan batas internasional..... 13

Tabel 2.1. Perbandingan aspek politik, hukum dan teknis antara batas internasional dan batas daerah..... 26

Tabel2.2. Konflik batas wilayah antar negara di Afrika status sampaitahun 2000..... 36

Tabel 2.3. Beberapakonflik batas wilayah yang besar yang terjadi antaranegara-negara diAmerika Tengah..... 39

Tabel 3.1. Empat parameter utama elipsoid WGS 84 67

Tabel 3.2. Pembagian zona UTM di Indonesia 71

Tabel 3.3. Pembagian skala, jumlah lembar dan sistem penomoran lembar peta RBIpada muka peta ukuran 1^0 30' x 1^0 skala 1:250.000 dengan nomorpeta misalnya 1508..... 72

Tabel 3.4. Peta dalam tahap delimitasi (dirangkum dari Jones, 1945)..... 92

Tabel 3.5. Karakteristik penyebab konflik menurut Moore, 1986 97

Tabel 4.1. Kriteria dan tolok ukur asesmen informasi geospasial sebagai *input* tahap penetapan batas daerah..... 110

Tabel 4.2. Kriteria dan tolok ukur asesmen informasi geospasial pada proses tahap penetapan batas daerah..... 111

Tabel 4.3. Kriteria yang bersifat geometris yang harus ada untuk peta batas wilayah lampiran UUPD sehingga peta tersebut dapat digunakan dalam penegasanbatas daerah..... 112

Tabel 4.4. Kriteria dan tolok ukur asesmen peta lampiran UUPD DOB..... 113

Tabel 4.5. Kategori sengketa batas daerah atas dasar kriteria tahun dengan mengingat tahun UUPD daerahyang bersengketa 114

Tabel 5.1. Perbedaan penegasan batas daerah versi Permendagri No.1 tahun 2006dengan demarkasi batas negara versi teori *boundary making* Jones (1945)..... 131

Tabel 5.2. Rekapitulasi data penegasan batas daerah untuk segmen

UNIVERSITAS GADJAH MADA
ASESMEN PERAN INFORMASI GEOSPASIAL DALAM PROSES BOUNDARY MAKING DAN SENGKETA BATAS DAERAH PADA ERA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA
SUMARYO, Ir. Subaryono, MA., Ph.D; Ir. Djurdjani, MSP., M.Eng., Ph.D.; Prof. Ir. Sobar Sutisna, M.Surv. Sc., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

batas daerah yang dibentuk tahun 2008 sampai tahun 2009 133

Tabel 5.3. Pengelompokan UUPD beserta peta lampiran UUPD yang diundangkanpada periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2009 136

Tabel 5.4. Ketersediaan peta RBI periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 di tiap provinsi yang terjadi pembentukan DOB 140

Tabel 5.5. Ketersediaan peta RBI tahun 2007di provinsi yang terjadi pembentukan DOB 142

Tabel 5.6. Ketersediaan peta RBI tahun 2008 sampai 2009 di provinsi yang terjadi pembentukan DOB 147

Tabel 5.7. Pasal batas wilayah pada UUPD periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 150

Tabel 5.8. Rekapitulasi hasil asesmen peta lampiran UUPD tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 152

Tabel 5.9. Peta wilayah pada lampiran UUPD periode tahun 2000 sampai tahun 2007 dievaluasi dari parameter skala peta..... 153

Tabel 5.10. Variasi skala peta wilayah administrasi lampiran UUPD periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 153

Tabel 5.11. Pasal batas wilayah pada UUPD periode 2008 sampai dengan tahun 2009 160

Tabel 5.12. Jumlah sengketa batas daerah di Indonesia yang terjadi pada saat kegiatan penegasan batas daerah pada era OTDA (tahun 2000 sampai dengan tahun 2009) kategori A, B, C 165

Tabel 5.13. Hasil diagnosis penyebab sengketa batas antar daerah kabupaten/kota pada kategori A 165

Tabel 5.14. Hasildiagnosis penyebab sengketa batas antar daerah kabupaten/kota pada kategori B 166

Tabel 5.15. Hasil diagnosis penyebab sengketa batas antar daerah kabupaten/kota pada kategori C 168

Tabel 5.16. Sebaran kasus sengketa batas daerah atas dasar pulau dan tahun

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
ASESMEN PERAN INFORMASI GEOSPASIAL DALAM PROSES BOUNDARY MAKING DAN SENGKETA BATAS DAERAH PADA ERA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA
SUMARYO, Ir. Subaryono, MA., Ph.D; Ir. Djurdjani, MSP., M.Eng., Ph.D.; Prof. Ir. Sobar Sutisna, M.Surv. Sc., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

pembentukan daerah 169

Tabel 5.17. Perbedaan luas provinsi yang sama yang dituliskan dalam beberapaUUPD kab/kota di provinsi yang bersangkutan 175

Tabel 5.18. Hubungan luas Daerah provinsi dalam satuan km^2 dengan skala wilayah calon DP Provinsi bila digambar pada format kertas ukuran A0 191

Tabel 5.19. Hubungan luas Daerah provinsi dalam satuan km^2 dengan skala wilayah calon DP Kabupaten bila digambar pada format kertas ukuran A0 191

Tabel 5.20. Hubungan luas Daerah provinsi dalam satuan km^2 dengan skala wilayah calon DP Kota bila digambar pada format kertas ukuran A0 192

Tabel 5.21. Kesalahan pengukuran di peta pada berbagai skala dan akibatnya terhadap kesalahan tersebut di lapangan 193

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
ASESMEN PERAN INFORMASI GEOSPASIAL DALAM PROSES BOUNDARY MAKING DAN SENGKETA BATAS DAERAH PADA ERA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA
SUMARYO, Ir. Subaryono, MA., Ph.D; Ir. Djurdjani, MSP., M.Eng., Ph.D.; Prof. Ir. Sobar Sutisna, M.Surv. Sc., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Formula BK1 dan BK2 menurut Burkholder (2008) 212
Lampiran 2. Formula BK10 dan BK11 menurut Burkholder (2008) 214
Lampiran 3. Contoh peta wilayah lampiran UUPD periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 (berlakunya PP No.129 tahun 2000)..... 218
Lampiran4. Contoh peta wilayah lampiran UUPD periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 (berlakunya PP No.78 tahun 2007)..... 230
Lampiran 5. Data sengketa batas daerah Kabupate/Kota di Indonesia Kategori A 236
Lampiran 6. Data sengketa batas daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Kategori B 242
Lampiran 7. Data sengketa batas daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Kategori C 259

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
ASESMEN PERAN INFORMASI GEOSPASIAL DALAM PROSES BOUNDARY MAKING DAN SENGKETA BATAS DAERAH PADA ERA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA
SUMARYO, Ir. Subaryono, MA., Ph.D; Ir. Djurdjani, MSP., M.Eng., Ph.D.; Prof. Ir. Sobar Sutisna, M.Surv. Sc., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS GADJAH MADA
ASESMEN PERAN INFORMASI GEOSPASIAL DALAM PROSES BOUNDARY MAKING DAN SENGKETA BATAS DAERAH PADA ERA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA
SUMARYO, Ir. Subaryono, MA., Ph.D; Ir. Djurdjani, MSP., M.Eng., Ph.D.; Prof. Ir. Sobar Sutisna, M.Surv. Sc., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ARTI LAMBANG

a = setengah sumbu panjang elipsoid refensi

b = setengah sumbu pendek elipsoid referensi

e = eksentrisitas elipsoid referensi, $e^2 = (a^2–b^2)/a^2$

f = penggepengan pada elipsoid referensi, f = (a-b)/a

h_o = tinggi titik datum terhadap bidang eliposid referensi

H_o = tinggi ortometris titik datum

N_A = jari-jari kelengkungan vertikal di titik A

N_o = undulasi geoid di titik datum

α_o = azimuth geodetik garis basisi di titik datum

A_o = azimuth astronomis garis basisi di titik datum

ω = kecepatan sudut rotasi bumi

GM = konstanta gravitasi bumi (termasuk massa atmosfer)

(φ,λ) = lintang, bujur geodetik pada sistem koordinat geodetik

(x,y) = absis, ordinat pada sistem koordinat kartesian di peta

ε = defleksi vertikal

ξ_o, η_o = komponen defleksi vertikal arah utara, komponen defleksi vertikal arah selatan di titik datum

(Xo,Yo, Zo) = posisi pusat elipsoid referensi

(ε_x, ε_y, ε_z) = orientasi arah-arah sumbu X, Y dan Z elipsoid dalam ruang terhadap sumbu-sumbu bumi

(Φ_o, Λ_o) = lintang, bujur astronomis pada sistem koordinat astronomis

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
ASESMEN PERAN INFORMASI GEOSPASIAL DALAM PROSES BOUNDARY MAKING DAN SENGKETA BATAS DAERAH PADA ERA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA
SUMARYO, Ir. Subaryono, MA., Ph.D; Ir. Djurdjani, MSP., M.Eng., Ph.D.; Prof. Ir. Sobar Sutisna, M.Surv. Sc., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAKOSURTANAL	: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
BIG	: Badan Informasi Geospasial
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
DBH	: Dana Bagi Hasil
DGN-95	: Datum Geodesi Nasional-1995
DOB	: Daerah Otonom Baru
DP	: Daerah Persiapan
FGD	:*Focus Group Discussion*
GNSS	: *Global Navigation Satellite System*
GPS	: *Global Positioning System*
GRS-67	: *Geodetic Reference System*- 1967
ICJ	: *International Court of Justice*
ID-74	: Indonesia Datum- 1974
ISO	: *International Standardization Organisation*
ITRF	: *International Terrestrial Reference Frame*
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
OTDA	: Otonomi Daerah
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
PP	: Peraturan Pemeritah
PNG	: *Papua New Guinea*
RBI	: Rupabumi Indonesia
RDTL	: Republik Demokrasi Timor Leste
RI	: Republik Indonesia
SDA	: Sumberdaya Alam
SIG	: Sistem Informasi Geografis
SRGI	: Sistem Referensi Geospasial Indonesia
TSC-BDR	: *Technical Sub Committee on Border Demarcation and Regulation*
UNCLOS 1982	: *United Nation Convention on the Law of the Sea 1982*
UNGN	: *United Nation Geographical Names*
UNTAET	: *United Nations Transitional Adminstration for East Timor*
UTM	: *Universal Transverse Mercator*
UU	: Undang-undang
UUD-45	: Undang-undang Dasar tahun 1945
UUPD	: Undang-undang Pembentukan Daerah
WGS-84	: *World Geodetic System-1984*